

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1. Kesimpulan

Implementasi kebijakan dana desa dalam menurunkan angka *stunting* di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas setelah dianalisis melalui aspek-aspek seperti kepatuhan, keterlibatan aktor pelaksana, kejelasan tujuan, perkembangan dan kerumitan program serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasi program menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dana desa dalam menurunkan angka *stunting* di Desa Sokawera belum sepenuhnya berhasil dan berjalan secara optimal. Secara lebih rinci analisis mengenai implementasi kebijakan dana desa dalam menurunkan angka *stunting* di Desa Sokawera dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Dari aspek kepatuhan, pada aspek ini kepatuhan dari para pelaksana kebijakan sudah tinggi baik itu dari pemerintah desa maupun dari petugas di lapangan seperti TPK desa, kader kesehatan dan kader posyandu. Pemerintah Desa Sokawera telah menyusun dan melaksanakan kegiatan-kegiatan berskala desa yang relevan dengan upaya penurunan *stunting* melalui APBDes sesuai peraturan yang ada walaupun keterserapan dana desa untuk *stunting* masih terbilang sedikit. Begitu pula dengan para petugas di lapangan yang telah melaksanakan kegiatan kedua intervensi gizi sesuai aturan dan prosedur yang ada.

- b. Dari aspek keterlibatan aktor pelaksana, implementasi kebijakan dana desa dalam menurunkan angka *stunting* di Desa Sokawera sudah diatur secara jelas dan juga rinci terkait pihak-pihak yang terlibat dan peran dari masing-masing pelaksana di dalam Peraturan Desa Sokawera Nomor 5 Tahun 2023 tentang Peran Desa dalam Konvergensi Pencegahan *Stunting*. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa pelaksana kebijakan yang kurang aktif ikut terjun dalam kegiatan-kegiatan penurunan *stunting* di Desa Sokawera, salah satunya adalah dari RSUD Ajibarang yang merupakan pengampu Desa Sokawera dalam upaya penurunan *stunting*. Sedangkan pihak yang paling aktif dalam upaya penurunan *stunting* adalah dari pihak TPK Desa, kader kesehatan dan kader posyandu.
- c. Dari aspek kejelasan tujuan, tujuan kebijakan tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018. Adapun tujuan dari kebijakan yang ingin dicapai di Desa Sokawera tidak hanya untuk menurunkan angka *stunting* yang tinggi saja tetapi terdapat keberlanjutan tujuan lain yaitu peningkatan kesehatan masyarakat, pola asuh, gizi, dan juga sanitasi serta tercapainya indikator-indikator yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa. Selanjutnya pencapaian tujuan pelaksanaan kebijakan dana desa dalam menurunkan angka *stunting* di Desa Sokawera belum terlihat optimal meskipun terdapat penurunan angka *stunting* beberapa tahun belakangan. Bahkan ada kemungkinan di tahun 2025 Desa Sokawera kembali menjadi lokus *stunting* di Kabupaten Banyumas.

- d. Dari aspek perkembangan dan kerumitan program, dalam implementasi kebijakan dana desa dalam menurunkan angka *stunting* setiap tahunnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan peraturan mengenai prioritas penggunaan dana desa sehingga terdapat beberapa penambahan atau perubahan dibandingkan dengan peraturan-peraturan sebelumnya. Namun perubahan yang terjadi tersebut tidak menghambat pelaksanaan kebijakan di Desa Sokawera. Selain itu untuk menunjang pelaksanaan konvergensi penurunan dan pencegahan *stunting* di Desa Sokawera, pemerintah desa mengeluarkan Peraturan Desa Sokawera Nomor 5 Tahun 2023 tentang Peran Desa dalam Konvergensi Penurunan *Stunting*. Adapun dalam pelaksanaan kebijakan dana desa dalam menurunkan angka *stunting* di Desa Sokawera bentuk koordinasi dan komunikasi antar aktor yang terlibat sudah cukup baik karena berbagai pihak selalu aktif untuk melakukan koordinasi dan juga komunikasi terkait pelaksanaan kegiatan atau program yang dilaksanakan.
- e. Dari aspek partisipasi masyarakat terhadap kebijakan, untuk tingkat partisipasi masyarakat Desa Sokawera terhadap program-program penurunan *stunting* sudah sangat baik bahkan tingkat partisipasi masyarakat di dalam kegiatan posyandu sudah mencapai 90%. Selain itu respons masyarakat juga positif untuk kegiatan Rumah Anak SIGAP bahkan koordinator dan fasilitator di Rumah Anak SIGAP harus menambah kelas karena antusiasme masyarakat yang tinggi.

f. Dari aspek faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, dalam penelitian ini faktor eksternal yaitu berasal dari ekonomi dan juga lingkungan, lingkunganlah yang paling menjadi faktor penghambat dalam penurunan angka *stunting* di Desa Sokawera. Hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat sanitasi masyarakat masih banyak yang buang air besar sembarangan, faktor penghambat lainnya berasal dari tingkat pemahaman terkait pola asuh terhadap anak yang juga masih sangat rendah.

5.2. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka untuk menindaklanjuti hasil penelitian, dapat dirumuskan implikasi sebagai berikut:

a. Implikasi Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian model implementasi kebijakan Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin dilihat dari perspektif *Compliance* dan *What's Happening* masih relevan digunakan sebagai indikator untuk mengukur implementasi suatu kebijakan. Hal ini dikarenakan perspektif tersebut dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi proses implementasi kebijakan. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sarana pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya bagi studi kebijakan publik yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

b. Implikasi Praktis

Adapun implikasi praktis yang dirumuskan oleh peneliti sebagai berikut:

- 1) Adanya pemanfaatan dana desa untuk *stunting* yang masih rendah sehingga kegiatan intervensi yang dilaksanakan belum sepenuhnya terlaksana semua.
- 2) Masih adanya kebingungan dari para pelaksana kebijakan terutama dari pemerintah desa dan pelaksana di lapangan terkait faktor domain penyebab tingginya angka *stunting* di Desa Sokawera, sehingga strategi pencegahan *stunting* belum sepenuhnya difokuskan kepada faktor domainnya.
- 3) Terdapat beberapa pelaksana kebijakan yang masih kurang aktif terlihat perannya untuk terlibat dalam penurunan *stunting* terutama pihak-pihak dari dinas terkait sehingga berdampak terhadap pelaksanaan kebijakan menjadi kurang optimal.
- 4) Masih kurangnya tingkat pemahaman dan pengetahuan orang tua terkait pengasuhan dan juga masih rendahnya tingkat sanitasi di masyarakat menyebabkan masih tingginya kasus *stunting* di Desa Sokawera. Hal ini dikarenakan pola asuh terkait pemberian makanan yang masih salah, sedangkan rendahnya sanitasi bisa menyebabkan penyakit infeksi yang berkepanjangan.
- 5) Peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dalam pelaksanaannya tidak mencantumkan

pedoman dan prosedur yang lengkap terutama terkait dana desa untuk *stunting*, hal ini menyebabkan para pelaksana di lapangan tidak mempunyai pedoman dan prosedur yang jelas dan terarah dalam melaksanakan kebijakan.

